

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)



**PEMERINTAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022**



### BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBUJUHAN KAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMAS LAHA	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT
									REKOMENDASI DPRD
1	1. Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan informatika	UU Nomor 25 Tahun 2009	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	2.656.389,737	2.199.895,782 (82,82%)	-	-	1. Penambahan tenaga IT 1 orang di tahun 2022 2. Tidak ada. Penambahan karena anggaran tidak tersedia

### 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBUJUHAN KAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMAS LAHA	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT
									REKOMENDASI DPRD
1	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		82.306,800	78.001,100	-	-	-	3. Hanya saja sebatas perencanaan	

		urusan Pemerintah Daerah	(42,79%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi	100.000.000	99.900.000 (99,57)	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang E-Government dan Apikita	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.086.104.050	1.073.542.756 (98,64%)	-	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Urusan Statistik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelola Domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup pemerintah Daerah Kab/Kota	1.606.084.000	1.603.284.000 (99,09%)	-	-	-	-	-	-
			2. Pengelola E-government Dilingkup pemerintah kab/kota	356.042.000	340.171.300 (88,55%)	-	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Urusan Statistik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9.448.500	9.387.800 (99,46)	-	-	-	-	-	-	-

5	Bidang Urusan Persandian	Dinas komunikasi dan informatika	<p>Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</p> <p>1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota</p> <p>2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Kab/kota</p>	9.448.500	9.397.800 (99,46%)	-	-
				82.410.00	79.348.500 (96,29%)	-	-

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	.....		

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD tahun N-1 (tahun 2021)	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang di selesaikan
1	Untuk Memperbaikan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu penambahan tenaga IT yang berkompeten	Penambahan Tenaga IT 1 Orang di tahun 2022	
2	Untuk Memungkinkan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika ke daerah daerah yang tidak terjangkau Sinyal ( Blank Spot ) perlu penambahan Mobil Dinas double Gardan	Tidak ada. Penambahan karena anggaran tidak tersedia	
3	Untuk meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu adanya kantor baru yang representatif	Hanya saja sebatas perencanaan dan penentuan lokasi kantor melalui RTRW di tahun 2022.	
4	Seiring kerjasama Penda Pasaman Barat dengan Pemko Bandung tentang kerjasama Smart City khususnya tentang pengadaan Command Center berimbas terhadap perlunya dukungan anggaran yang cukup dan pemerintah daerah untuk pelaksanaannya.	Dilaksanakan di Tahun 2022, karena anggaran tersedia di tahun 2022 untuk pengembangan PPID dan Command center.	

KEPALA  
DIVAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EDY MURDANI SH  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19670822 198803 1 004



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Sockarno Hatta No. 29 Telp. (0753) 466262 fax. (0753) 466170. Simpang Empat 26515  
Website : WWW.kominfo.pasamanbaratkab.go.id  
e-mail:diskominfo@pasamanbaratkab.go.id

1. Penentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Uraian	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian	Keterangan
	Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah seluruh OPD	$\frac{43}{43} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan ditampi basah)

3. Indikator Kinerja Hasil (Output)

No	Uraian	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian	Keterangan
	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang terhubung dengan akses internet yang disediakan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah seluruh OPD	$\frac{43}{43} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan ditampi basah)
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah pengguna akses internet berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Jumlah seluruh OPD	$\frac{63}{63} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan ditampi basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		3) Tersebarnya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	-Youtube -Facebook -Instagram -Website		
<b>2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>					
<b>a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)</b>					
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{X}{100} \times 100 = 0\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
<b>b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)</b>					
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan akan secara online dan terintegrasi	1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015	$\frac{X}{32} \times 100 \% = 100\%$ x 100%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
2)	Percentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{26}{32} \times 100 = 83,2\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)	
3)	Percentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{32}{32} \times 100 = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)	
4)	Percentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang diimplementasikan secara elektronik yang telah tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) Yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik x 100% Jumlah layanan	$\frac{21}{28} \times 100 = 75\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)	
5)	Percentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik x 100% Jumlah layanan	$\frac{1}{29} \times 100 = 3,44\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	6)	Percentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah system elektronik}} \times 100\%$	$\frac{30}{75} \times 100 = 40\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	7)	Percentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan public dan layanan administrasi}} \times 100\%$	$\frac{5}{29} \times 100 = 17,24 \%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	8)	Percentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{32}{32} \times 100 = 100 \%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	9)	Percentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{30}{32} \times 100 = 93,75\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	10)	Percentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis datanya	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{30}{32} \times 100 = 93,75\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
11)	Percentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dimiliki pemerintah	$\frac{0}{32} \times 100\% = 0\% = 0$		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
12)	Percentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city Jumlah perangkat daerah	$\frac{32}{32} \times 100\% = 100\% = 100$		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
13)	Percentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo Jumlah ASN pengelola TIK	$\frac{0}{4} \times 100 = 0\% = 0$		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Cukup jelas	Ada		

### 3. Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota

#### a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Komitmen	Percentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota Jumlah penduduk	$\frac{279.454}{279.454} \times 100 = 100\% = 100$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2020)	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
1)	Kominfo	1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah x 100% Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi	76 26 — X 100 = 34,2%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan ditampi basah)
2)		2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	4 4 — X 100 = 100 % x 100%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan ditampi basah)
3)		3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP Jumlah diseminasi dan layanan informasi public	0 0 — X 100= 0 % x 100%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan ditampi basah)

Simpang Empat, Januari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

  
Edy Murdhani, SH  
Penubina Utama Muda IV.c  
NIP. 19670822 198803 1 004